**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan setelah adanya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah menjadi perangkat daerah Kabupaten / Kota yang setara dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 209 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat daerah Kabupaten / Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan”.

Pemerintah Kecamatan merupakan Tingkat Pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas - tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas - tugas umum Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi:

* Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
* Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
* Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan
* Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
* Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan
* Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan
* Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Selain melaksanakan tugas – tugas umum Pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintahan diatasnya untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Hal tersebut menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah Kabupaten / kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Kompleksitas masalah yang dihadapi Kecamatan berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, dan heterogenitas masyarakat pada berbagai hal diwilayah Kecamatan, baik Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, Kemampuan Ekonomi, Kesehatan, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat. Perencanaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Lebih lanjut Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 dalam ketentuan umum menetapkan bahwa Renstra adalah sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2019 - 2023 dilaksanakan berdasarkan proses dan pendekatan sebagai berikut:

1. Proses Teknokratik.

Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra OPD adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra PD. Rancangan teknokratik Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2019 - 2023 dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Serang Tahun 2019 – 2023. Oleh karena itu penentuan tujuan, sasaran strategis, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun mendatang berfokus pada pencapaian tujuan RPJMD Kota Serang Tahun 2019 – 2023 yang telah memuat Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih.

1. Proses Politik

Proses politik dalam penyusunan Renstra PD merupakan proses penyusunan Rencana Strategis PD yang diselaraskan dengan Visi, Misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Proses politik ini merupakan kelanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rancangan Renstra PD.

1. Penetapan Renstra Perangkat Daerah (PD)

Rancangan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang ditetapkan dengan surat keputusan Camat Cipocok Jaya. Penetapan Renstra dilakukan setelah Rancangan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya disesuaikan dengan Rancangan Akhir RPJMD Kota Serang.

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2019 - 2023 dilakukan melalui empat tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renstra PD

2. Penyusunan rancangan Renstra PD

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

4. Penetapan Renstra PD

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2019 - 2023 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2019 - 2023, dan memperhatikan Renstra PD terkait dilingkungan Kota Serang. Renstra tersebut selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk Rencana Kerja / Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Hubungan kinerja pembangunan daerah dengan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya disajikan pada gambar 1.2.

** Gambar 1.2.**

1. **Landasan Hukum**

Rancangan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang periode 2019- 2023 ini disusun mempertimbangkan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang;
15. Peraturan WaliKota Serang Nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
24. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 28 Tahun 2017, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
27. **Maksud dan Tujuan**
28. **Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2019 – 2023 Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi Pelayanan Masyarakat Cipocok Jaya melalui Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2019 – 2023 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

1. **Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
2. Menjadi acuan dalam melakukan monitoring kemajuan pencapaian kinerja Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
3. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.
4. **Sistematika Penulisan Renstra**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini akan menguraikan latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika Renstra.

**BAB II TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD**

Bagian ini menguraikan tentang, yang pertama yaitu tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Kedua, menguraikan informasi sumber daya yang dimiliki Kecamatan Cipocok Jaya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Ketiga, menguraikan kinerja pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang tahun-tahun sebelumnya. Keempat, menguraikan informasi mengenai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya.

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian ini menguraikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang perlu ditangani Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, meliputi yang pertama, menguraikan hasil identifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, menguraikan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Ketiga, menguraikan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan Renstra PD Terkait di lingkungan Kota Serang, dan keempat, penentuan isu-isu strategis berdasarkan berbagai penelaahan tersebut di atas.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA**

Bagian ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk periode 2019 - 2023.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**

Bab ini berisi kalimat-kalimat penutup.

**BAB II**

**TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PD**

Keberadaan Kecamatan sebagai OPD dilingkungan pemerintah Kota Serang dikukuhkan dalam Undang – Undang No 23 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang – undang tersebut disebutkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten / Kota yang dipimpin oleh Camat. Sementara Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwal) Serang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedudukan, Susuman Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dalam Perwal tersebut dinyatakan bahwa Kecamatan sebagai OPD adalah sejajar dengan OPD – OPD lain dilingkungan Pemerintah Kota Serang seperti Dinas, Badan Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang antara lain berwenang dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara mandiri.

Berdasarkan hirarki Pemerintahan yang berlaku di Indonesia, setiap Kecamatan dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota / Bupati melalui Sekretaris Kota / Kabupaten. Wilayah kerja Kecamatan terbagi menjadi kelurahan yang masing – masing dipimpin oleh Lurah. Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedudukan, Susuman Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data di bidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi / perijinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
12. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lainnya yang dilimpahkan Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 28 Tahun 2017, organisasi Kecamatan Kota Serang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris, membawahkan:
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Sub Bagian Keuangan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. **CAMAT**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan - urusan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, Ekonomi dan Pembangunan, serta Ketentraman dan Ketertiban umum sesuai dengan Visi dan Misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1. **URAIAN TUGAS**
2. Menetapkan rencana strategi kecamatan untuk menjabarkan Visi, Misi, dan program Walikota dalam lingkup urusan - urusan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, Ekonomi dan Pembangunan, serta Ketentraman dan Ketertiban umum;
3. Menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup lingkup urusan - urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum.
4. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota, meliputi :
5. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
6. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
7. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
8. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan kriteria :
9. proses sederhana;
10. objek perizinan berskala kecil;
11. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
12. tidak memerlukan teknologi tinggi.
13. Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
14. Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan kriteria:
16. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
17. kegiatan berskala kecil; dan
18. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
19. **TANGGUNG JAWAB**

Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan SOP Kelancaran tugas dan fungsi Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kelancaran tugas sesuai dengan batas waktu.

1. **SEKRETARIS CAMAT**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas kecamatan dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan.

1. **URAIAN TUGAS**
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
4. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan sesuai peraturan perundang-undangan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
7. mengkoordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
8. mengkoordinasi penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
9. evaluasi dan pelaporan administrasi umum, perencanaan program, anggaran dan ketatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
10. pelaksanaan fungsi yang lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
11. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
12. **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA**

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

1. **TANGGUNG JAWAB**

Kesesuaian pelaksanaan tugas dengan SOP Kelancaran tugas dan fungsi Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Membantu menyelesaikan tugas.

1. **URAIAN TUGAS**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan pengendalian urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kebutuhan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
3. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
4. melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
5. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
6. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
7. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
11. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
12. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;
14. melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasny
17. **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UTAMA**

Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat dibidang administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

1. **URAIAN TUGAS**
2. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan, program, evaluasi dan pelaporan;
3. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
4. melaksanakan penatausahaan anggaran Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan pelayanan lainnya di bidang keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
8. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
10. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, rencana kerja dan anggaran;
11. melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rka/rkpa dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
12. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dan dokumen pelaksanaan angaran/ dokumen pelaksanaan perubahan angaran berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan;
13. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;
14. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
15. melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemberdayaan masyarakat.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi meliputi :
2. mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
3. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
4. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentranaman dan ketertiban umum serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
2. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
3. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Seksi Pemerintahan Umum**

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan umum.

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
2. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
3. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
4. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
5. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan publik.

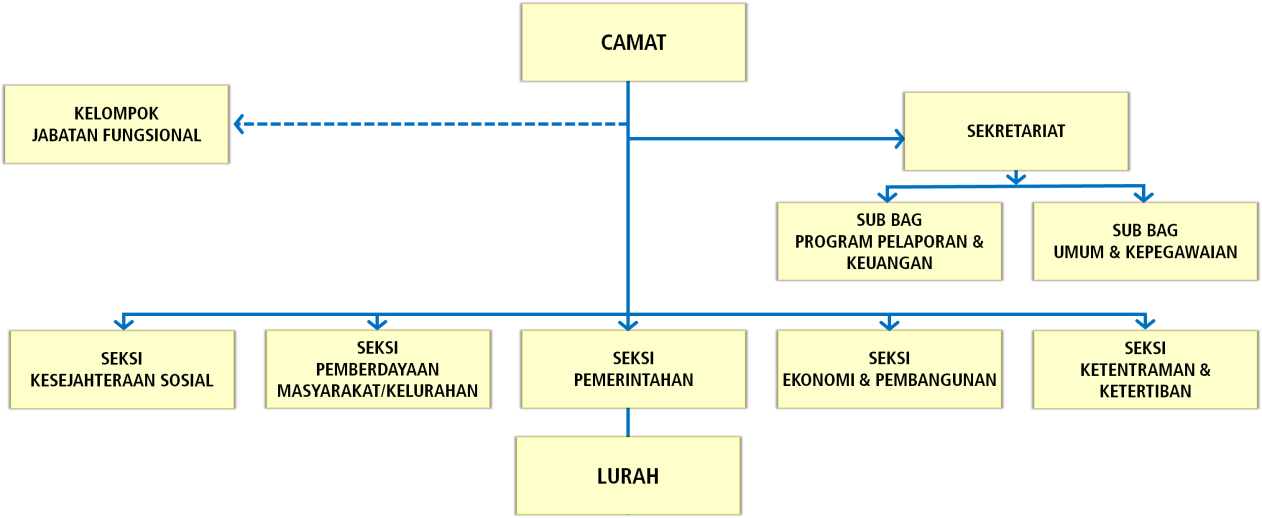
1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
2. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
3. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
4. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
5. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pada Kecamatan**

Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi pada masing-masing tempat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang bersangkutan bekerja.
2. Dalam hal Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana dan Fungsional.

Struktur organisasi Kecamatan Cipocok Jaya dapat digambarkan sebagai berikut :



* 1. Sumber Daya

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tugas yang diemban Kecamatan Cipocok Jaya yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukan dengan:

1. Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
2. Perkembangan jumlah aparatur, dan
3. Tingkat kreativitas aparatur.

**Tabel 2.1.**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Status Kepegawaian | Jumlah Pegawai |
| 1.  2. | Pegawai Negeri Sipil (PNS  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) | 54 Orang  - |
| Jumlah Pegawai | | 54 Orang |

**Tabel 2.2.**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Eselon** | **Jumlah Pegawai** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6  7.  8. | Camat  Sekretaris Camat  Kepala Seksi  Kepala Sub Bagian  Kepala Kelurahan  Seklur Kelurahan  Seksi Kelurahan  Fungsional Umum | III.a  III.b  IV.a  IV.b  IV.a  IV.b  IV.b  - | 1 Orang  1 Orang  5 Orang  2 Orang  8 Orang  8 Orang  24 Orang  5 Orang |
| Jumlah Pegawai | | - | 54 Orang |

**Tabel 2.3.**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pangkat** | **Golongan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8 | Pembina  Penata Tk.I  Penata  Penata Muda Tk.I  Penata Muda  Pengatur Tk.I  Pengatur  Pengatur Muda | IV/a  III/d  III/c  III/b  III/a  II/d  II/c  II/a | 7 Orang  13 Orang  18 Orang  8 Orang  4 Orang  1 Orang  2 Orang  1 Orang |
| Jumlah Pegawai | | - | 54 Orang |

**Tabel 2.4.**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | Pasca Sarjana  Sarjana  Diploma  SMA  SMP  SD | 15 Orang  30 Orang  -  8 Orang  1 Orang  - |
| Jumlah Pegawai | | 54 Orang |

**Tabel 2.5.**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Diklat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Diklat** | **Jumlah Pegawai** |
| 1.  2. | PIM III  PIM IV | 3 Orang  23 Orang |
| Jumlah Pegawai | | 26 Orang |

* 1. Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Cipocok Jaya yang merupakan unsur pembantu pemerintah yang terus berupaya memberikan pelayanan public yang optimal menjadi semangat penting untuk dilakukan, Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena pelayanan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja Pelayanan publik mempunyai implikasi yang luas dari berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga reformasi pelayanan publik akan menjadi salah satu prioritas bagi Kecamatan Cipocok Jaya untuk terus menyempurnakan pelayanan publik melalui bintek dan pelatihan - pelatihan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintahan daerah.

Pada dasarnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cipocok Jaya dapat diukur dari beberapa indikator salah satunya adalah peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan keterbukaan akses informasi pelayanan serta peningkatan akses pengawasan internal Kecamatan dan Kelurahan. Disamping itu dijabarkan pula secara umum dalam program kerja seksi - seksi di Kecamatan Cipocok Jaya:

* Seksi Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap kegiatan pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
2. Pencatatan atas mutasi penduduk di Kecamatan
3. Penyusunan laporan bulanan mengenai data kependudukan
4. Pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pembinaan kepada kelurahan- kelurahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
7. Fasilitasi penataan kelurahan
8. Melaksanakan kegiatan perlombaan antar kelurahan

* Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Pembinaan terhadap kegiatan pembinaan dan penyuluhan mengenai masalah – masalah sosial masyarakat
2. Pembinaan dalam rangka pmberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya
3. Fasilitator dalam penyelenggaraan aktifitas organisasi sosial dan LSM di bidang kesejaheraan sosial.
4. Penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana dan masyarakat miskin
5. Mengesahkan Administrasi surat keterangan tidak mampu
6. Pembinaan petensi kesejahteraan sosial

* Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan :

1. Pembinaan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesehatan
2. Koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas - tugas puskesmas diwilayah kerja Kecamatan
3. Penyuluhan mengenai pencegahan penyalahgunaan obat, narkotika, dan bahan berbahaya lainnya.
4. Penyuluhan program wajib belajar

* Seksi Keamanan dan Ketertiban :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling ditingkat Kelurahan, kampung atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling;
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan diseluruh kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah kelurahan untuk membuat peraturan kelurahan/ desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat kelurahan;
7. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
8. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval MTQ, Pawai Panjang Mulud, Serang Fair dll;

* Seksi Ekonomi dan Pembangunan:

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Penertiban organisasi - organisasi di masing - masing Kelurahan;
3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang Kelurahan dan melaksanakan musrenbang Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di Kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;

**Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik yang Akan dilaksanakan :**

1. Kesederhanaan dalam Pelayanan

Yang mengandung arti bahwa prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, tidak berbelit - belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

1. Kejelasan dan Kepastian

Yang mengandung arti bahwa setiap pelayanan yang akan diberikan sesuai dengan persyaratan teknis, dimana jadwal waktu penyelesaian dan rincian biaya dan tata cara pembayaran jelas tanpa keragu-raguan.

1. Keamanan dalam Pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarkat.

1. Keterbukaan dalam pelayanan

Prinsip ini mengandung arti bahwa apapun informasi yang berkaitan dengan pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka.

1. Efisien dan Ekonomin dalam pelayanan

Prinsip ini mengandung artibahwa penetapan – penetapan waktu, biaya dan prosedur penerbitan pelayanan harus dilakukan secara efisien dan ekonomis.

* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Batasan dalam pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat belum sempurna
2. Lambatnya moderenisasi perangkat informasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Rendahnya tingkat gotong royong masyarakat perkotaan
4. Isu pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan
5. Akses jalan Utama di Kecamatan Cipocok Jaya masih terkendala banjir dan sampah

Sedangkan peluang-peluang dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Letak Geografis dan Topografi Kecamatan Cipocok Jaya yang berada di pusat Kota
2. Penyebaran potensi perdagangan tersebar di Kecamatan Cipocok Jaya
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut merencanakan penyelenggaraan pemerintahan untuk membangunan wilayahnya cukup signifikan, khususnya dalam perencanaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bentuk Evaluasi dan Solusi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam media pelaporan. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Cipocok Jaya yang telah ditetapkan serta telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran.

Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cipocok Jaya :

Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi

Tabel 3.1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFIKASI PERMASALAHAN | | | |
|  |  |  |  |
| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| 1 | MASIH KURANGNYA KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT CIPOCOK JAYA | BELUM BAIKNYA IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN URUSAN | Realisasi Penilaian Kondisi Kelurahan dalam keadan baik |
| Realisasi Identifikasi Permasalahan urusan yang ditangani |
| Realisasi Inventarisasi Permasalahan urusan yang ditangani |
| BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN PATEN MASYARAKAT | Realisasi Pelaksanaan SOP Pelayanan yang ditangani |
| Pengendalian tepat waktu sesuai SOP yang ditangani |
| Identifikasi masalah pelayanan tepat waktu pelayanan yang ditangani |
| Penyelesaian masalah pelayanan tepat waktu |
| MASIH KURANGNYA KOORDINASI DAN INTEGRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN | Masalah Urusan yang telah dikoordinasikan terhadap Inventarisasi Permasalahan |
| Masalah Urusan yang telah diselesaikan terhadap Inventarisasi Permasalahan |
| Kegiatan Pembangunan yang terintegrasi dalam penyelesaian masalah terhadap Total kegiatan |

**TABEL 3.2**

**DAFTAR PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**



* 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan wakil Walikota Serang

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang adalah *“* *****Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya******”*

Dalam pencapaian Visi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode Rencana Strategis Lima Tahunan, evaluasi dilaksanakan dengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan program / kegiatan yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak *(input, process, output, outcome,* dan *impact)* berdasarkan data, informasi dan bukti - bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen - komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan kegiatan di Kota Serang.

Dalam Rencana Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kota Serang beberapa hal yang harus diemban atau dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai Visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitasnya selalu digerakan oleh Misi.

3.2.1 VISI

**“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA KOTA PERADABAN”** dimaknai sebagai Civil Siciety yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

**KOTA BERDAYA** bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang

**KOTA BERBUDAYA** merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2019 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

***“Aje Kendor Membangun Serang”***

Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari:

**Kota Serang yang Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota Serang sehingga terwujud kepemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).

**Kota Serang yang Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

**Kota Serang yang Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

**Kota Serang yang Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

**Kota Serang yang berdaya saing** adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA, dan Nasional.

**Kota Serang yang berbudaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

**Kota Serang yang Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

**Kota Serang yang Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

* + 1. **MISI**

1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;
2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;
3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;
4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Oleh karenanya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang

“**TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA**” :

Pada MISI KEEMPAT (4) yaitu : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Selanjutnya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Kewilayahan dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih.

* 1. **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sebagai langkah tindak lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 dan No.28 Tahun 1999 tersebut pemerintah telah menerbitkan inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mencakup siklus interigrasi diawali dengan disusunnya rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kinerja tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja.

Dari siklus AKIP tersebut dapat dilihat bahwa penyusunan Rencana Kinerja merupakan fase awal dalam system AKIP. Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Daerah, maka setiap unit kerja menyusun rencana strategis. Rencana Strategis yang disusun oleh satuan kerja harus mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan pemerintah itu sendiri.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, transparan dan legitimit, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi seta nepotisme. Setiap unit pemerintah yang ada dalam lingkungan Kota Serang,termasuk Kecamatan Cipocok Jaya harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggarannya good governance dengan mengembangkan dan menerapkan suatu sistem AKIP.

* 1. **Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Cipocok Jaya terletak pada jarak ±4 Km2 dari Ibu Kota Serang, terletak pada posisi strategis yaitu sebagai Bagian Wilayah Kota.

Secara Administratif, Kecamatan Cipocok Jaya terbagi menjadi 8 Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan yaitu 2.283.082Ha, Kecamatan Cipocok Jaya yang terdiri dari 8 Kelurahan tersebut, terbagi menjadi 87 Rukun Warga (RW) dan 341 Rukun Tetangga (RT).

Batas-batas administrasi wilayah Kecamatan Cipocok Jaya, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Serang
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Curug dan Pabuaran
3. Sebelah Barat : Kecamatan Taktakan
4. Sebelah Timur : Kecamatan Walantaka

Bentuk topografi Kecamatan Cipocok Jaya sebagian besar merupakan dataran, dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 m dari permukaan laut, memiliki jenis tanah podsolik merah kuning berpasir dengan struktur tanah remah dengan suhu udara berkisar antara 250C – 320C serta curah hujan rata-rata 90,2mm/tahun.

Menurut pembagian wilayah pengembangan Kota Serang, Kecamatan Cipocok Jaya termasuk Wilayah Pengembangan (WP) Tengah yang peruntukkannya adalah untuk pusat pemerintahan/perkantoran, perdagangan, jasa, perumahan dan pemukiman, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Meskipun peruntukkannya tidak ada untuk pengembangan pertanian, tetapi kalau dilihat dari potensi pertaniannya, terutama wilayah Cipocok Jaya bagian barat (Tembong, Dalung dan Gelam) masih cukup tinggi terutama untuk pengembangan sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias.

Jumlah Penduduk Kecamatan Cipocok Jaya sampai saat ini adalah: 89.114 Jiwa, yaitu :

1. Jumlah Penduduk Laki-laki : 46.881 Jiwa
2. Jumlah Penduduk Perempuan : 44.527 Jiwa
   1. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cipocok Jaya ditentukanlah isu-isu strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Serang. Berikut adalah isu Strategis yang berkaitan dengan arah kebijakan Kota Serang.

Dalam penentuan isu strategis ini, Kecamatan Cipocok Jaya melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Kecamatan Cipocok Jaya lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

* + 1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis **ke-empat** tentang Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dengan Permasalahan pokok:
* Kinerja penyelenggaraan pemerintahan;
* Kualitas dan daya saing pelayanan publik;
  + 1. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, ada pada Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan dengan fokus yaitu ; Hasil Evaluasi LKjIP dan Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Cipocok Jaya dimasa datang. Identifikasi isu strategis pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Urusan
2. Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Penataan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan
4. Penanganan Terpadu Pelayanan PATEN
5. Optimalisasi Pemberdayaan dan Pembangunan Ekonomi
6. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan
7. Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan
8. Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
9. Pemanfaatan Potensi Sosial Kemasyarakatan

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Kewilayahan. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Kewilayahan, maka dapat dirumuskan isu strategis Kecamatan Cipocok Jaya pada tabel berikut ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek Isu Strategis** | | |
|  |  |  |
| NO | ISU STRATEGIS | ASPEK TERKAIT |
| 1 | Peningkatan Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Urusan | Peningkatan Kapasitas SDM |
| Pemantauan dan Identifikasi permasalahan Urusan |
| Penyusunan Daftar Permasalahan Urusan |
| Koordinasi dan Rencana Penyelesaian Permasalahan Urusan |
| 2 | Penanganan Terpadu Pelayanan PATEN | Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan PATEN |
| Pengendalian Pelayanan PATEN tepat waktu |
| Penyelesaian Masalah pada Pelayanan PATEN tepat waktu |
| 3 | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pembangunan | Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan |
| Integrasi lintas OPD dalam pembangunan Kewilayahan |
| Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkup Kelurahan dan Kecamatan |

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan Kecamatan Cipocok Jaya lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

* 1. Meningkatkan Penataan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.
  2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.
  3. Meningkatkan Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.
  4. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di Kecamatan Cipocok Jaya.

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan melalui Identifikasi dan Inventarisasi Masalah, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Urusan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan PATEN di kelurahan dan kecamatan.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan terhadap apa yang ingin dicapai Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakaan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di dalam tubuh Kecamatan Cipocok Jaya saat ini.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup *sub issue* sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2019-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Cipocok Jaya. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2019-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Kecamatan Cipocok Jaya ada pada **misi ke - 4** yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” .

Misi ke - 4 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :

**Tujuan daerah** :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan indikator tujuan daerah :

* **Indeks Reformasi Birokrasi Daerah**

**Sasaran Daerah** :

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerinahan daerah, dengan indikator sasaran daerah :

* **Indeks Kepuasan Masyarakat**
* **Nilai LPPD Kota**
* **Hasil Laporan Akip**
* **Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

**Tujuan Renstra** : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan

Indikator Tujuan > **Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Cipocok Jaya**

**Sasaran Renstra**: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan

Indikator Sasaran :

* Capaian Kelurahan berkategori Berkembang
* Hasil Evaluasi LKjIP
* capain Pelayanan Publik

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 4.1.**

**Indikator Pelayanan Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUJUAN DAN SASARAN DAERAH** | | **TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA** | | **INDIKATOR** | **SATUAN** | **AWAL** | **TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN** | | | | | **AKHIR** |
| **(IMPACK)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2023** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi |  |  | | **INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH** | Ktgr | C | C | C | B | B | B | B |
| Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerinahan daerah |  | | * **IKM** * **Nilai LPPD Kota** * **Hasil Laporan AKIP** * **Hasil Laporan Keuangan Daerah (LKPD** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan | | INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KECAMATAN CIPOCOK JAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan | | Capaian kelurahan yang memenuhi standar kelurahan (Sangat Berkembang) | % | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| Hasil evaluasi LkjIP | Ktgr | C | CC | CC | B | B | B | B |
|  |  |  | | Capaian Pelayanan Publik | % | 60 | 65 | 70 | 72 | 75 | 77 | 77 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Baik penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Kecamatan Cipocok Jaya akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Tahun 2019 – 2023, telah menentukan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Serang terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 Kota Serang. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Program Pemerintahan Umum Kecamatan, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang baik.
3. Penyediaan sarana dan Prasarana infrastruktur kecamatan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya sarana dan prasarana kantor (titik lokasi).
4. Peningkatan keamanan dan ketertiban, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
5. Pendistribusian dan pengendalian SPT PBB, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terdistribusikannya SPPT PBB kepada wajib pajak.
6. Pembinaan dan penyelenggaraan lomba kelurahan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terlaksananya Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Kelurahan.
7. **Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
8. Fasilitasi pengembangan kota sehat, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terfasilitasinya Pengembangan Kota Sehat.
9. Fasilitasi pengembangan kota layak anak, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Fasilitasi Kota Layak Anak
10. Fasilitasi Peran serta Kepemudaan dan Olah Raga, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terfasilitasinya Peran Serta Kepemudaan dan Olah Raga.
11. Pemberdayaan Perempuan dan masyaraka, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Pelaksanaan Musyawarah pembangunan kecamatan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kecamatan.
13. Fasilitasi Kebudayaan dan Keagamaan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terfasilitasinya Kebudayaan dan Keagamaan.
14. Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terfasilitasinya Penanggulangan Kemiskinan.
15. **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
16. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipocok Jaya, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW
17. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karundang, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
18. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penancangan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
19. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Agung, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
20. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarsari, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
21. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembong, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
22. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalung, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
23. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gelam, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Musrenbang kelurahan dan honor RT RW.
24. **Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T), meliputi kegiatan sebagai berikut :**
25. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cipocok Jaya (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
26. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karundang (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Penancangan (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
28. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjar Agung (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
29. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Banjarsari (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
30. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembong (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
31. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalung (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
32. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukajaya (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pembinaan Masyarakat Kelurahan.
33. **Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T), meliputi kegiatan sebagai berikut :**
34. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Cipocok Jaya (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Cipocok Jaya.
35. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Karundang (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Karundang.
36. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Penancangan (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Penancangan.
37. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Banjar Agung (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Banjar Agung.
38. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Banjarsari (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Banjarsari.
39. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tembong (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Tembong.
40. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Dalung (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Dalung.
41. Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Gelam (DAU-T), dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Tersedianya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan Gelam.
42. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
43. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipocok Jaya, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
44. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karundang, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
45. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Penancangan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
46. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjar Agung, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
47. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Banjarsari, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
48. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembong, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
49. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dalung, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah: Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
50. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gelam, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Terpenuhi Sarana dan Prasarana Kantor Kelurahan.
51. **Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
52. Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor dan tersedianya bahan bacaan.
53. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pengadaan perlengkapan gedung kantor, Pengadaan sewa kantor kelurahan dan Pengadaan peralatan gedung kantor.
54. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua dan pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor.
55. Rehabilitasi Gedung Kantor / Rumah Dinas / Rumah Jabatan, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Jumlah gedung Kecamatan dan Kelurahan.
56. Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan(kegiatan) dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (kegiatan).
57. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Dokumen pengelolaan aset barang milik daerah kecamatan cipocok jaya
58. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai dan rapat-rapat.
59. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Biaya perjalanan dinas.
60. **Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
61. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Dokumen laporan keuangan triwulanan dan semesteran.
62. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Dokumen laporan keuangan akhir tahun
63. **Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja, meliputi kegiatan sebagai berikut:**
64. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Dokumen Rencana strategis dan Rencana kerja.
65. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Dokumen RKA dan DPA.
66. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Dokumen LPPD, LKjIP, LKPJ kecamatan cipocok jaya.
67. Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah, dengan *indikator kinerja kegiatan* adalah : Penyusunan data dan profile OPD.
68. **Program Pelayanan Administrasi Kelurahan, meliputi kegiatan sebagai berikut :**
69. Operasional Pelayanan Kelurahan Cipocok Jaya, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan cipocok jaya.
70. Operasional Pelayanan Kelurahan Karundang, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan Karundang
71. Operasional Pelayanan Kelurahan Sumur Penancangan, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan Penancangan.
72. Operasional Pelayanan Kelurahan Banjar Agung, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan Banjar Agung.
73. Operasional Pelayanan Kelurahan Banjarsari, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan Banjarsari.
74. Operasional Pelayanan Kelurahan Tembong, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan Tembong.
75. Operasional Pelayanan Kelurahan Dalung, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah: Operasional rutin kelurahan Dalung.
76. Operasional Pelayanan Kelurahan Gelam, dengan *indicator kinerja kegiatan* adalah : Operasional rutin kelurahan Gelam.

Untuk lebih jelas dan rincinya tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat dalam **tabel 6.1** Buku Renstra ini.

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut adalah tabel 7.1 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang 2019-2023 dengan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cipocok Jaya, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandiri menjadi tolok ukur renstra Kecamatan Cipocok Jaya dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan demikian Renstra Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Serang
2. Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan output kegiatan
3. Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1)

Berikut adalah indikator kinerja Kecamatan Cipocok Jaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Serang.

1. Indikator Kinerja Camat Serang
2. Capaian Kelurahan berkategori Berkembang
3. Hasil evaluasi LKjIP
4. Indikator Kinerja KA.SIE Tata Pemerintahan
5. Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu
6. Capaian realisasi distribusi SPPT
7. Capaian kinerja pengelolaan pemerintahan tingkat kecamatan
8. Capaian kinerja kelurahan Kategori Baik
9. Indikator Kinerja KA.SIE Ekonomi dan Pembangunan
10. Realisasi pengajuan usulan musrembang tk kecamatan yang diakomodir
11. Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu
12. Cakupan pembinaan perekonomian Kecamatan
13. Capaian Pembangunan Infrastruktur Kecamatan
14. Indikator Kinerja KA.SIE Ketentraman dan Ketertiban Umum
15. Cakupan pembinaan Trantib Kecamatan
16. Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu
17. Cakupan Bencana yang ditangani
18. Capaian Penanganan K3
19. Indikator Kinerja KA.SIE Kesejahteraan Sosial
20. Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
21. Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu
22. Capaian Penanggulangan Masalah Sosial
23. Indikator Kinerja KA.SIE Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
24. Cakupan pelayanan PATEN tepat waktu
25. Capaian Kelurahan Sehat
26. Capaian Kelurahan Ramah Anak
27. Cakupan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
28. Cakupan Kampung Tematik
29. Indikator Kinerja Kelurahan
30. Tingkat Partisipasi masyarakat Kelurahan dalam kegiatan pembangunan
31. Cakupan Pembinaan Masyarakat Kelurahan
32. Capaian pembangunan Sarana dan prasarana Infrastruktur Kelurahan
33. Indikator Kinerja Bidang **Kesekretariatan**

Indikator Kinerja Kepala Dinas ;

Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)

Indikator Kinerja Kepala Sekretariat ;

1. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan
2. Persentase Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik
3. Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. gelolaan dan Pelaporan Keuangan
5. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan
6. Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja
7. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

Keselarasan Kinerja RPJMD dengan Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2019-2023 ini, telah diupayakan menampung substansi dari ketentuan Rencana Strategis Kota Ser ang Tahun 2019-2023 yang memberikan arahan bagi seluruh jajaran aparat Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk membangun daerah berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses Pembangunan di Kota Serang.

Rencana Strategis Kecamatan Cipocok Jaya Tahun 2019 - 2023 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada dilingkungan Kecamatan Cipocok Jaya dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Serang Tahun 2019 – 2023.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Serang, April 2021 |
|  | **CAMAT CIPOCOK JAYA** |
|  |  |
|  | **H. TB. YASSIN,. S. Sos, M. Si**  **NIP. 19660711 199302 1 002** |